



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Australia, 2 Mei 2011

Nomor : **100/PPIA/KE/KU/2011**
Perihal : **Evaluasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia
terhadap Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Australia,
Rabu 26 April 2011 - Senin 2 Mei 2011**
Lampiran : **3 Lembar**

Yth. Kepada

Bapak H. Abdul Kadir Karding

Ketua Komisi VIII DPR RI

Ketua Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Australia

Dengan hormat,

Mengingat rencana awal kunjungan kerja Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI ke Australia tidak mengagendakan audiensi dengan mahasiswa serta keterlibatan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) dalam pertemuan yang diacarakan dengan departemen/instansi yang terkait di Australia (Lampiran 1), maka atas kesempatan yang diberikan untuk:

1. Dua perwakilan PPI Australia untuk mengikuti pertemuan Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII dengan Mr Stephen Kelly, *Manager for Aged Care and International Programs, Department of Health and Services*, dan Mr Peter Van Vliet, *Assistant Secretary Multicultural Affairs Department of Immigration and Citizenship* yang dilakukan di KBRI Canberra, Jumat, 29 April 2011.
2. PPIA Victoria, bekerjasama dengan KJRI Melbourne, untuk mengagendakan audiensi Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII dengan pelajar dan warga Indonesia di Melbourne yang berlangsung di Ruang Bhinneka KJRI Melbourne, Sabtu 30 April 2011.

Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami mengapresiasi dua kesempatan yang diberikan tersebut sebagai bentuk itikad baik Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI dalam menyambut semangat pelajar Indonesia di Australia yang tergabung dalam PPI Australia.

Setelah mengamati jalannya rangkaian acara kunjungan kerja Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII DPR di Australia yang efektif berlangsung selama empat hari, PPI Australia merasa perlu menyampaikan evaluasi sebagai berikut:



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

1. **Evaluasi Substansi RUU Penanggulangan Fakir Miskin (PFM)**

- a. Berdasarkan definisi fakir miskin yang digunakan di RUU PFM, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, kami memahami konsep yang dikedepankan adalah konsep perlindungan sosial. Namun demikian, konsep ini kurang diperhatikan dalam RUU PFM karena elemen perlindungan sosial yang disoroti adalah bantuan sosial, advokasi, dan bantuan hukum. Padahal, perwujudan perlindungan sosial tidak selalu terkait dengan advokasi dan bantuan hukum.
- b. Berbagai instrumen yang digunakan untuk pembentukan RUU PFM, yaitu jaminan sosial, perlindungan sosial, dan sebagainya, sebenarnya telah diatur pada UU yang sudah pernah disahkan sebelumnya yaitu UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disahkan pada tahun 2004 dan UU Kesejahteraan Sosial yang disahkan pada tahun 2009. Selain itu rencana memasukan sumber dana melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) tumpang tindih dengan UU lain. CSR sudah dijelaskan aturan dan perinciannya dalam UU Perseroan Terbatas (yang perlu diatur dalam PP CSR).

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, kami PPI Australia menilai substansi RUU PFM sangat patut untuk dipertanyakan.

Rekomendasi:

Memastikan implementasi UU SJSN dan UU Kesejahteraan Sosial sebelum membuat sebuah draft RUU baru yang berusaha mengelola isu kebijakan sosial untuk fakir miskin.

2. **Evaluasi Pemilihan Australia sebagai negara tujuan kunjungan kerja**

Pendekatan pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial di Australia sangat berbeda dengan pendekatan oleh Pemerintah Indonesia. Australia adalah negara yang banyak mengandalkan peranan pasar yang disusul oleh peranan negara. Di Indonesia, peranan terbesar berada di pundak komunitas yang kemudian baru disusul negara. Dalam



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

kaitannya dengan hal ini, peranan modal sosial menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika tidak ada pertimbangan yang matang terhadap kontekstualisasi kondisi lokal di Indonesia, dikhawatirkan pengembangan model semacam itu justru dapat merusak modal sosial yang sudah terbentuk di masyarakat saat ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami PPI Australia menilai kunjungan kerja Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI ke Australia sebagai negara tujuan adalah tidak tepat.

Penyikapan:

Kami menyayangkan kepergian Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII ke Australia, karena sekiranya kunjungan kerja semacam ini memang harus dilakukan, maka yang dikunjungi adalah negara-negara yang karakter pembangunan kesejahteraannya memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, terutama negara-negara maju semacam Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan atau yang sedang menuju maju seperti China dan India.

3. **Evaluasi jumlah rombongan yang berangkat**

Kami melihat keberangkatan kunjungan kerja yang melibatkan seluruh anggota Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan jika *sense of crisis* dan kepedulian terhadap rakyat kecil merupakan dua asas utama yang dijunjung tinggi oleh Komisi VIII DPR RI, utamanya terkait dengan besarnya jumlah anggaran negara yang dikeluarkan.

Secara matematis, anggaran Rp. 811 juta yang dialokasikan kepada 16 anggota Komisi VIII DPR RI dalam waktu 6 hari merupakan sebuah jumlah yang patut dipertanyakan. Pada Lampiran 2 bapak dapat membaca *case study* bagaimana kunjungan kerja parlemen dilakukan di Australia dan Kanada dilakukan sebagai bahan perbandingan. Singkat kata, dari pandangan mata kami di dua pertemuan yang kami ikuti, jumlah delegasi secara linier tidak sebanding dengan kepadatan dan hasil pertemuan.

Berdasarkan pertimbangan ini, kami PPI Australia menilai bahwa kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Australia adalah tidak efisien,



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

sehingga memboroskan uang negara.

Rekomendasi:

Menyesuaikan jumlah delegasi yang diberangkatkan dalam kunjungan kerja sesuai dengan kebutuhan. Cara ini mendukung efisiensi kunjungan kerja karena mereka yang diberangkatkan adalah mereka yang betul-betul memahami persoalan RUU yang diajukan.

Pada sisi lain, langkah ini tentunya akan menghemat lebih banyak anggaran negara yang bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, seperti pembekalan dalam bentuk kursus bahasa bagi para anggota DPR RI dan pembekalan dalam bentuk pelatihan IT para anggota DPR RI yang, berdasarkan informasi dari audiensi di Melbourne, kami nilai perlu untuk dilakukan.

4. Evaluasi proses pemerolehan informasi (studi banding)

Berdasarkan pengamatan kami dalam pertemuan Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII dengan Mr Stephen Kelly, *Manager for Aged Care and International Programs, Department of Health and Services*, dan Mr Peter Van Vliet, *Assistant Secretary Multicultural Affairs Department of Immigration and Citizenship* sebagai penyaji yang dilakukan Jumat, 29 April 2011, sebenarnya proses penyajian informasi yang dilakukan dengan cara paparan yang disampaikan secara verbal oleh penyaji, dengan metode presentasi Power Point, ceramah, maupun tanya jawab sebenarnya tidak harus dilakukan di Australia. Hal serupa dapat dilakukan di Indonesia tanpa perlu memberangkatkan anggota Komisi VIII DPR RI sebanyak 16 orang ke Australia. Sebagai bukti, pemaparan ini dilakukan di KBRI Canberra bukan di lokasi komunitas aborigin di Australia, atau di kantor pelayanan pemerintah untuk *unlucky Australians*.

Terlebih lagi, sebagaimana tersaji dalam Lampiran 3, data yang diungkapkan oleh Mr Stephen Kelly dalam presentasinya, misalnya, dapat ditelusuri dari situs

<http://www.humanservices.gov.au/customer/> dan dapat dipelajari dengan baik oleh Komisi VIII DPR RI dari Indonesia.

Selain itu kami mencatat tidak semua daftar pertanyaan yang sudah



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

dirilis dalam booklet *Bahan Bacaan Kunjungan Kerja Tim Panja RUU tentang Fakir Miskin ke Australia 26 April-2 Mei 2011* yang dikeluarkan oleh Sekretariat Komisi VIII DPR RI ditanyakan dalam proses pertemuan. Sangat disayangkan bahwa banyak pertanyaan berbobot yang dicantumkan dalam bahan bacaan tersebut tidak ditanyakan kepada para penyaji. Hal ini tentunya mengurangi bobot keberhasilan pertemuan dalam mencapai tujuan kunjungan kerja tersebut.

Berdasarkan pertimbangan ini, PPI Australia menilai kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI tidak efektif dikarenakan proses pencarian dan pemerolehan informasi yang tidak tepat guna dan dimanfaatkan dengan baik oleh anggota yang berangkat ke Australia untuk kunjungan kerja.

Rekomendasi:

- a. **Mengundang secara publik pemberian masukan dari pengajar, peneliti dan pelajar Indonesia di luar negeri.**

PPI Australia melihat setiap elemen bangsa Indonesia ini sebenarnya merupakan sumber berharga dalam memberikan masukan strategis kepada proses perumusan kebijakan oleh Komisi VIII DPR RI pada khususnya, dan DPR RI pada umumnya.

Oleh sebab itu, kami merekomendasikan agar DPR mengoptimalkan peran para peneliti Indonesia yang mengajar di Australia, atau pun pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di Australia.

Di sisi lain PPI Australia yakin sepenuhnya bahwa setiap elemen bangsa di atas sangatlah terbuka dan siap untuk bermitra dengan DPR RI untuk memberikan pandangan dan masukan yang berharga terkait dengan bidang kerja yang sedang menjadi fokus DPR. Ada pun cara yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan hal ini adalah dengan mengundang para elemen tadi ke tanah air atau melalui komunikasi elektronik/virtual (e.g. korespondensi email, teleconference dan konferensi jarak jauh) untuk memberikan masukan atau pandangan tentang usaha penanganan fakir miskin di Australia.

Selain itu Komisi VIII DPR RI dan DPR RI juga dapat mengoptimalkan peran Aliansi Perhimpunan Pelajar Indonesia



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

(PPI) Internasional (OISAA.org) yang beranggotakan PPI dari 45 negara untuk melihat dan membandingkan lebih jauh proses penanganan fakir miskin, atau efektifitas jalannya kebijakan lain dilakukan di luar negeri.

- b. Mengundang secara publik pemberian masukan dari pejabat kenegaraan/ahli di negara yang dituju.

Secara praktis, misalnya, seorang Mr Stephen Kelly yang didatangkan ke Indonesia tentu membutuhkan jauh lebih sedikit biaya ketimbang 16 anggota Komisi VIII DPR RI yang diterbangkan dari tanah air. Hal ini tentunya setelah melalui proses komunikasi yang cukup antara pihak DPR RI yang mengkaji sebuah undang-undang dengan mitra di negara tujuan sebelum akhirnya merealisasikan kunjungan tersebut. Akan ada lebih banyak anggaran negara yang bisa dihemat dan dapat digunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat.

- c. Mengundang secara publik pemberian masukan dari masyarakat luas.

Setelah mengidentifikasi sebuah *policy problem / issue*, DPR hendaknya mempelajari segala informasi mengenai kebijakan tersebut melalui proses *policy inquiry*. Selain mengundang ahli, untuk menjangkau aspirasi masyarakat luas dalam perancangan dan penyempurnaan kebijakan tersebut, DPR perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan melalui proses *public inquiry* yang terpublikasikan dengan baik.

Sebagai perbandingan, di Australia, sebagaimana bisa ditemukan pada situs <http://www.pc.gov.au/about-us/inquiryprocess>, terlihat jelas bagaimana para akademisi, organisasi penelitian, dan organisasi non-pemerintah terlibat langsung dalam proses pemberian masukan kepada Parlemen Australia dalam merumuskan kebijakan.

Kami mengetahui sebenarnya partisipasi masyarakat terbuka dalam proses formulasi RUU sudah diatur dalam UU No. 10 / 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan dan UU No. 27 / 2009 tentang MPR DPR DPD DPRD, dan merupakan



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

hak warga Indonesia untuk memberikan masukan kepada DPR seperti yang diamanatkan oleh UU.

Agar hasilnya maksimal, proses masukan dari masyarakat, pelajar, pengajar, peneliti dan ahli dari dalam dan luar negeri harus terjadi sebelum DPR ‘memutuskan’ hasil akhir untuk sebuah UU, dan/atau memutuskan untuk mengadakan studi banding ke daerah atau ke luar negeri, seperti yang disebut oleh bapak Ketua Komisi VIII saat acara audiensi di Melbourne.

- d. **Mengoptimalkan jalur komunikasi dan informasi elektronik yang formal yang dimiliki DPR RI (www.dpr.go.id) dan dapat dengan mudah diakses publik untuk menyampaikan publikasi hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Australia.**

5. Evaluasi proses komunikasi yang melibatkan dua bahasa

Hasil pengamatan kami dalam pertemuan Komisi VIII dengan Mr Stephen Kelly, *Manager for Aged Care and International Programs, Department of Health and Services*, dan Mr Peter Van Vliet, *Assistant Secretary for Multicultural Affairs, Department of Immigration and Citizenship* menunjukkan permasalahan komunikasi yang tidak seharusnya terjadi. Proses pemaparan yang dilakukan kedua penyaji dalam bahasa Inggris harus dengan melibatkan dua orang penerjemah. Proses penerjemahan yang dilakukan secara dua arah, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari pihak penyaji, dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dari pihak Komisi VIII DPR RI menyebabkan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia.

Dalam catatan kami, sebuah kalimat pendek atau frase panjang yang disampaikan penyaji rata-rata memakan waktu 7 detik; jeda yang muncul antara penyaji dan penerjemah memakan waktu 2 detik, dan penerjemahan memakan waktu 6 detik. Di sini kita bisa melihat ada 8 detik yang terbuang hanya untuk sebuah kalimat pendek atau frase panjang yang disampaikan penyaji. Bisa dibayangkan berapa banyak waktu yang terbuang untuk sebuah penyajian yang berlangsung sekitar 30 menit dan terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan kalimat.

Di sisi lain, pada sesi tanya jawab, terjadi berulang kali kesalahpahaman antara yang dimaksud oleh penanya dari Tim Panja tentang Fakir



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Miskin Komisi VIII DPR RI. Hal yang sama juga terjadi ketika penyaji salah menanggapi maksud yang disampaikan oleh penanya yang diakibatkan oleh bentuk pertanyaan yang berbelit-belit dan tidak efektif memenuhi sasaran. Secara keseluruhan, hal ini berakibat pada berdeviasinya pemahaman informasi yang dapat diserap oleh Komisi VIII DPR RI dalam paparan yang disampaikan penyaji.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka kami PPI Australia menilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan dalam pertemuan Komisi VIII DPR RI adalah tidak efektif dikarenakan kendala bahasa.

Rekomendasi:

Pembatasan izin kunjungan kerja anggota DPR bagi mereka yang tidak memiliki kecakapan berbahasa asing yang mencukupi untuk menerima dan menyampaikan informasi secara dua arah dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan oleh:

- a. Ijasah pendidikan tinggi di negara yang menjadi tujuan kunjungan kerja, atau di negara yang berbahasa yang sama dengan negara yang dituju, dan atau;
- b. Kepemilikan sertifikasi kecakapan berbahasa, misalnya IELTS (International English Language Testing System) atau TOEFL (Test of English as a Foreign Language), HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), TFI (Test de Francais International), DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera), dan ALPT (Arabic Language Proficiency Test).

Sekiranya anggota DPR yang akan melakukan kunjungan negara tidak menunjukkan kecakapan berbahasa sebagaimana tersebut di atas, maka kunjungan tersebut hendaknya ditunda hingga mereka mendapatkan pelatihan bahasa asing dengan hasil kecakapan untuk berkomunikasi dua arah, atau pembicara di negara tujuan dapat melakukan pemaparan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang seharusnya dapat digunakan oleh sebagian anggota kunjungan kerja seperti bahasa Inggris.



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Demikian evaluasi ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen PPI Australia untuk memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara. Pertanyaan dan tanggapan terkait dokumen evaluasi ini dapat disampaikan kepada kami melalui email ke: sekretariat@ppi-australia.org atau melalui telepon kepada Mochamad Subhan Zein (+61413548356) dan/atau Dirgayuza Setiawan (+61450579748).

Hormat kami,

Mochamad Subhan Zein
Ketua Umum PPI Australia

Dirgayuza Setiawan
Wakil Ketua Umum PPI Australia

Tembusan:

- Yth. Bpk Marzuki Ali, Ketua DPR RI
- Yth. Bpk Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI
- Yth. Bpk. Taufiq Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI
- Aliansi Perhimpunan Pelajar Indonesia Internasional (OISAA)
- Media Cetak dan Elektronik di Indonesia



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Lampiran 1: Pertemuan Antara Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Mr Peter Van Vliet, Assistant Secretary Multicultural Affairs, Department of Immigration and Citizenship

Waktu dan Tempat: 11.00 sampai 12.00, Ruangan Balai Kartini, KBRI Canberra

Pembicara:

- Bpk. Abdul Kadir Karding (AKK)
- Peter Van Vliet (PVV)

Penerjemah:

- Dhani Eko Wibowo (DEW)
- Denny Hamdani (DH)

Peserta: Seluruh Anggota Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI

Perwakilan PPIA:

- Shafira Machrusah
- Mochamad Subhan Zein

Jalannya Acara

NO	Jam	Agenda dan pembicaraan	Catatan pengamatan
1	11.15	AKK membuka dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, bahasa, etnis, dan agama. Seringkali keragaman budaya ini, yang seharusnya menjadi kekayaan, justru menjadi sumber konflik. Contohnya seperti kasus yang marak baru-baru ini, yaitu tentang kasus Ahmadiyah. Hal ini tentunya membuat perlunya pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana penanganan konflik dilakukan dalam latar belakang masyarakat yang beragam semacam ini. Itu sebabnya Komisi VIII datang untuk belajar tentang bagaimana Australia menangani masyarakatnya yang beragam.	
2	11.20	PVV mengatakan dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan secara bergantian oleh DH dan DEW, bahwa Australia adalah masyarakat multikultur yang berbeda dengan Indonesia. Australia adalah multikultur karena imigran, sementara Indonesia adalah multikultur	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

		<p>karena keturunan. Meski demikian, tentu ada banyak kesamaan di antara keduanya. Secara umum, pemerintah Australia memberikan kebijakan bahwa keberagaman budaya di Australia merupakan satu hal yang dijunjung tinggi dan mesti dihormati. Statistik yang menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang Australia adalah lahir di luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar negeri, merupakan bukti betapa pentingnya kebijakan yang komprehensif dan adil dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia memiliki kebijakan yang menyeluruh yang tidak membedakan latar belakang kesukuan atau agama, meskipun Australia terdiri dari berbagai macam imigran yang berasal dari agama dan etnis yang berbeda. Jika dulu pola imigrasi Australia lebih banyak diisi oleh imigran dari Eropa, dalam dua decade belakangan ini pola imigrasi itu berubah dan banyak diisi oleh imigran dari Asia. PVV mengatakan bahwa dia tidak perlu menyatakan lebih banyak paparan, karena informasi semacam itu bisa diperoleh dalam booklet yang dia bagikan atau website dari DIAC. Sebaliknya dia mempersilakan Komisi VIII untuk membaca booklet yang dia bagikan dan mempersilakan sesi pertanyaan untuk dimulai.</p>	
3	11:36	<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh H. Ahmad Zainuddin</i> Fungsi pelayanan teknis AMC seperti apa? Apakah memerlukan undang-undang? Apakah ada pelayanan yang selektif, di mana pemberi pelayanan mengutamakan mereka yang berasal dari sukunya?</p> <p>JAWABAN PVV: AMC tidak memerlukan undang2, tapi memerlukan sebuah keputusan yang yang diberikan oleh cabinet. Sesudah itu tidak ada keputusan secara langsung yang dibuat oleh pemerintah melainkan diberikan oleh AMC sendiri. Untuk pelayanan yang adil dan bebas diskriminasi, contohnya adalah kebijakan utama AMC dimana semua refugee dan imigran diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program bahasa Inggris sebanyak 500 jam, untuk memudahkan mereka dalam mengakses pelayanan pemerintah yang diberikan dalam bahas a Inggris. Pelayanan ini diberikan tanpa melihat latar belakang etnis. Mereka menyadari bahwa di antara imigran, terutama para pengungsi, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak dapat berbahasa Inggris.</p>	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

		Aksesnya diberikan tidak secara diskriminatif kepada mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris. Itu sebabnya Australia berhasil dalam menyatukan para migrant dalam 20 tahun terakhir.	
4	11:40	<p>PERTANYAAN <i>diajukan oleh Drs. Zulkarnain Djabbar:</i> Adakah kelompok radikal agama di Australia? Berapa banyak anggaran yang diberikan pemerintah untuk multicultural?</p> <p>JAWABAN PVV: Di Australia sendiri, ada kelompok yang tidak menyetujui multikulturalisme. Terdapat lebih dari 50% penduduk Australia yang mendukung multiculturalism, 15% tidak setuju, dan kurang dari 35% abstain. Ada beberapa group agama di Australia, termasuk sayap kanan dan esktremis agama. Keduanya sudah ditangani Polisi, dan agen intelijen, yang mengawasi mereka secara terus-menerus. Tindakan diambil sekiranya mereka sudah melakukan kekerasan. Budget yang disediakan pemerintah Australia di antaranya 500 juta dollar/tahun untuk AMEP, settlement, dan membantu pengungsi menjadi warga negara. Sebagai tambahan, state government juga menganggarkan 50-100 juta untuk festival multicultural.</p>	
5		<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh Hj. Aji Farida Padmo Ardan:</i> Pandangan etika moral, bisa nggak multicultural diangkat menjadi satu pandangan dan menjadi bagian menyeluruh dari Australia?</p> <p>JAWABAN PVV Adalah prinsip orang Australia bahwa untuk bersatu, caranya adalah kalian harus mendukung demokrasi, toleransi hukum dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dan inilah yang menjadi core dari Australia. Kita juga mendukung bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Ini adalah policy umum bagaimana menjadi sorang Australia dari multicultural society.</p>	
6		<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh H. Jazuli Juwaini :</i> Bagaimana menjaga harmoni antar etnik? Peran pemerintah? Kebijakan pemerintah Australia thd pelajar miskin yang datang dari luar? Berapa persen perempuan yang ada di pemerintahan.</p>	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

	<p>JAWABAN PVV: Australia memiliki keanekaragaman agama, namun tidak sebanyak agama di Indonesia. 3% Budha, 2% Muslim, 2% Hindu, 1% Yahudi, 35% tidak beragama atau tidak menyatakan agama mereka. Sisanya adalah mayoritas Kristen (65%). Konflik antara Protestan dan Katolik terjadi di masa lalu. Sebagai negara sekuler, di Australia ada pemisahan antara gereja dan negara, dan ini diatur dalam undang-undang. Meski demikian Australia mendukung penuh kebebasan beragama di bawah payung hukum yang berlaku. Ketika ada penyebaran kebencian atau kejahatan antara agama, maka institusi pemerintah dapat dipastikan terlibat. Mengenai keterlibatan perempuan, PVV tidak punya data mengenai jumlah perempuan di parlemen, tapi secara kasar dapat dikatakan kalau sekitar 20% adalah wanita, dan jangan dilupakan Perdana Menteri dan Gov. General Australia keduanya adalah wanita.</p>	
	<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh Muhammad Saiful Anwar:</i> Apakah multikulturalisme juga masuk dalam kurikulum?</p> <p>JAWABAN PVV: Dalam kurikulum, ada subject bernama kewarganegaraan, yang berisi isu hukum, demokrasi, dll. National kurikulum ini sedang dikaji dan ada tekanan untuk menjadikan isu multikulturalisme dalam kurikulum. Hal ini menjadi penting, terutama terkait dengan pelajar internasional, karena sebelumnya banyak orang yang menjadikan visa pelajar untuk menjadi PR, sekarang hal ini akan diubah untuk menghimbau orang untuk menjadi pelajar. Australia ingin memberikan kesempatan yang baik bagi orang asing dalam menjadi PR.</p>	
	<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh Abdul Rozaq Rais:</i> Bagaimana dengan Harmony Day? Kapan acara ini diselenggarakan? Apakah sebulan sekali? Dua bulan sekali? Setahun dua kali?</p> <p>JAWABAN PVV: Harmony Day diadakan setiap tahun pada tanggal 21 Maret /tahun, sesuai dengan semangat yang dipancarkan UN tentang harmony dunia. Harmony Day diselenggarakan dalam bentuk selebrasi di sekolah-sekolah dan universitas, di mana anak-anak menggunakan kostum daerah masing. Hal ini penting untuk mengusung tema bahwa semua orang merupakan bagian dari</p>	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

		masyarakat seluruhnya.	
		<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh Abdul Kadir Karding:</i> Bagaimana dengan imigran miskin? Apakah ada gambarannya?</p> <p>JAWABAN PVV: Imigran miskin di Australia jumlahnya ada 180 ribu orang, di mana 120 ribu orang memiliki potensi kerja. Tantangannya adalah 60 ribu orang yang mencakup pengungsi, family reunion, terutama orang-orang Afrika yang tidak punya latar belakang bahasa Inggris dan tidak punya pendidikan. Mereka tidak dibayari rumahnya oleh pemerintah Australia, tapi dibantu mencari rumah. Ada keuntungan yang sama yang diterima. Pemerintah Australia sudah membantu mereka, namun pada kenyataannya mereka banyak yang tidak giat bekerja. Karenanya pemerintah Australia mengharapkan perbaikan terjadi di generasi kedua.</p>	
		<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh Ina Ammania:</i> apakah ada kasus women trafficking di Australia?</p> <p>JAWABAN PVV: Banyak terjadi. Pemerintah Australia memiliki undang undang sangat tegas buat penegak hukum buat diskriminasi terhadap wanita. Mereka yang melanggar dihukum.</p>	
		<p>PERTANYAAN: <i>diajukan oleh Abdul Kadir Karding:</i> Apakah ada kecemburuan social antara aborigin dan pendatang yang sukses?</p> <p>JAWABAN PVV: Australia mempunyai kebijakan untuk menangani orang-orang indigenous. Secara umum rata-rata harapan hidup dan pendapatan mereka memang berbeda lebih rendah. Tentu menjadi masalah ketika imigran datang dan memiliki skill yang baik sehingga mereka menjadi lebih sukses. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Australia memiliki policy <i>closing the gap</i>, yaitu untuk meningkatkan living standard orang-orang indigenous agar sesuai dengan orang-orang oz pada umumnya. Hubungan orang-orang indigenous sangat kompleks secara historis, karena hal ini sudah berlangsung sejak kedatangan imigran yang datang ke</p>	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

		Australia sejak 1778.	
	12.05	Acara pertemuan ditutup oleh H. Abdul Kadir Karding dengan memberikan kenang-kenangan kepada Peter Van Vliet dan foto bersama dengan anggota Komisi VIII DPR RI.	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Lampiran 2: Model Kunjungan Kerja ke Luar Negeri oleh Parlemen Australia dan Parlemen Kanada

Studi Kasus I: Parlemen Australia

Keanggotaan	Parlemen Australia memiliki 226 orang anggota terdiri dari 150 perwakilan tiap-tiap wilayah elektoral dan 76 anggota senat.
Jumlah perjalanan dinas	Pada tahun 2007-2008, Parlemen Australia mengadakan tujuh (7) kali perjalanan dinas resmi keluar negeri yang dibiayai negara
Rombongan delegasi	Jumlah anggota parlemen yang turut berkisar antara dua (2) hingga tujuh (7) anggota.
Tujuan perjalanan	Tujuan kunjungan-kunjungan anggota parlemen Australia adalah untuk menghadiri rapat anggota parlemen sesama anggota <i>Commonwealth countries</i> , rapat anggota parlemen se Asia Pasifik, rapat Majelis Umum PBB, kunjungan bilateral ke sejumlah negara, dan menghadiri rangkaian acara keakraban (<i>community affairs</i>) atas undangan negara lain
Durasi kunjungan	4 hari (kunjungan bilateral/kekerabatan) – 3 bulan (sebagai perwakilan resmi pemerintah di Majelis Umum PBB)
Sumber	http://www.aph.gov.au/house/pubs/ar07-08/append/appx7.htm
Contoh laporan	http://www.aph.gov.au/house/info/pro/41p_reports/europeaninst_norway.pdf Laporan perjalanan terdiri dari: (1) Nama-nama anggota parlemen yang berkunjung (2) Latar belakang negara yang dikunjungi (3) tujuan kunjungan (4) catatan pertemuan (<i>minutes of meeting</i>) (5) rekomendasi/kesimpulan dari pertemuan yang relevan dengan tujuan kunjungan (6) jadwal kunjungan lengkap beserta tanggal dan waktu (<i>itinerary</i>)



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Studi Kasus II: Parlemen Kanada

Keanggotaan	Parlemen Kanada memiliki 413 orang anggota terdiri dari 308 perwakilan tiap-tiap wilayah elektoral dan 105 anggota senat.
Jumlah perjalanan dinas	Tidak ditemukan informasinya
Ukuran delegasi	9 orang
Tujuan perjalanan	Kunjungan ke Forum Parlemen Asia Pasifik (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke 15 di Moskow, tahun 2007.
Durasi kunjungan	6 hari (kunjungan bilateral/kekerabatan)
Sumber	http://www.parl.gc.ca/IIAPublications/Document.aspx?Language=E&Mode=1&sbdid=54784060-4962-419F-9F0D-AA8BB32E4841&sbpidx=1
Contoh laporan	http://www.parl.gc.ca/IIAPublications/SmartBook/Documents/54784060-4962-419f-9f0d-aa8bb32e4841/54784060-4962-419f-9f0d-aa8bb32e4841.pdf Laporan terdiri dari: (1) Nama-nama anggota parlemen yang berkunjung (2) tujuan kunjungan (3) catatan pertemuan (<i>minutes of meeting</i>) (4) Jadwal kunjungan dan biaya yang dikeluarkan beserta rinciannya (5) Memorandum yang diperoleh (6) rekomendasi/kesimpulan dari pertemuan yang relevan dengan tujuan kunjungan



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Lampiran 3: Pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Mr Stephen Kelly, Manager for Aged Care and International Programs Department of Health Services

Waktu dan Tempat: 09.00 sampai 11.00, Ruangan Balai Kartini, KBRI Canberra

Pembicara:

- Bpk. Abdul Kadir Karding (AKK)
- Mr Stephen Kelly (SK)

Moderator: Bapak Duta Besar RI untuk Australia

Penerjemah:

- Dhani Eko Wibowo (DEW)
- Denny Hamdani (DH)

Peserta: Seluruh Anggota Komisi VIII DPR menghadiri acara

Perwakilan PPIA

- Shafira Machrusah
- Mochamad Subhan Zein

Jalannya Acara

NO	Jam	Agenda dan pembahasan	Catatan Pengamatan
1	09.05	Duta Besar membuka acara	
2	09.15	AKK memperkenalkan anggotanya satu persatu. AKK mengatakan bahwa walaupun fakir miskin mendapat jaminan hukum dalam UUD 1945, namun belum ada payung hukum secara Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan jaminan secara sosial kepada mereka yang miskin, janda, dan orang cacat. Anggota DPR yang lain memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh AKK. Sebagian mencatat dengan menggunakan iPad dan buku catatan, sementara sebagian memperhatikan saja. AKK menggarisbawahi bagaimana lewat kesempatan ini Komisi VIII DPR dapat belajar dari pemerintah Australia dalam menangani kemiskinan, menggali data-data untuk mendapatkan indicator yang jelas dalam penanganan yang jelas terhadap kemiskinan,	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

		mengetahui sejauh mana pemerintah Australia melakukan intervensi dalam menangani kemiskinan, termasuk mengetahui anggaran untuk fakir miskin seperti APBN di pemerintah Australia untuk pendidikan dan bagaimana pemerintah Australia mengelola bantuan social seperti Centerlink.	
3	9:23	SK memberikan penjelasan mengenai struktur DHS. Ada 6 organisasi yang berada di bawah DHS, termasuk Centrelink yang mengatur bagaimana mereka yang berpendapatan rendah dan tidak beruntung, dengan berbagai macam derivasinya, dibantu oleh pemerintah Australia.	
4	9:28	SK menjelaskan poin-poin yang tertuang dalam PPT slides yang dipaparkan kepada hadirin. Karena penjelasan dilakukan dalam bahasa Inggris, maka DEW memberikan penerjemahan dalam bahasa Indonesia tentang Centrelink Overview agar dapat dipahami oleh hadirin. Untuk setiap kalimat yang disampaikan SK, kemudian diterjemahkan oleh DEW. Dalam perhitungan saya, satu kalimat atau frasa panjang yang disampaikan SK memakan waktu rata-rata sekitar 9 detik, jeda 2 detik, dan diterjemahkan oleh DEW dalam 8 detik. Oleh SK, latar belakang Centerlink dimulai sejak tahun 1997 yang ditujukan untuk memberikan pembayaran jaminan sosial. Dengan adanya Centerlink ini maka semua pelayanan sosial dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia. Sebelum tahun 1997 jaminan sosial, bantuan tenaga kerja, dan lainnya dilakukan terpisah. Seringkali hal ini menjadi tidak efektif dan menimbulkan kebingungan di antara pelanggan Centerlink. Akuntabilitas Centerlink melalui mekanisme yang melibatkan CEO Centerlink, pertimbangan apakah sesuai dengan harapan pemerintah, dan pernyataan outcome statement Centerlink. Ada 119 produk yang diberikan oleh Centerlink dan tersebar serta melibatkan 36 departemen pemerintah. Setiap departemen memiliki kebijakan untuk memberikan informasi termasuk memperoleh informasi baik dalam cakupan nasional maupun internasional kepada Centerlink. Koordinasi antar departemen adalah isu yang krusial bagi Centerlink, karena seringkali menimbulkan kebingungan, seperti kepentingan dan harapan business yang berbeda, kebingungan pelanggan untuk harapan yang berbeda. Centerlink melakukan meeting secara regular dan laporan kepada departemen, berdasarkan input dari proposal yang masuk dalam rangka membuat kebijakan yang baru serta	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

memberikan masukan kepada pemerintah. Pelayanan yang diberikan Centerlink di antaranya: network approach to service delivery, service delivery innovations, multilingual services, service delivery role in fulfilling election commitments. Mereka berusaha untuk memberikan pelayanan online yang maksimal, memberikan pelayanan di daerah terpencil, ada juga visiting services yang mendatangi pelanggan. Ada 1.3 juta orang Australia yang membutuhkan penerjemah, karena mereka memiliki latar belakang linguistic dan budaya yang berbeda. Ada servicing unit yang juga diberikan secara mobile untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan mengunjungi 275 kota, melewati 52,000 km, mengeluarkan >2500 klaim bantuan, mengatur 4500 perjanjian dan membantu korban bencana alam. Ada juga pelayanan hub based untuk memberikan pelayanan yang konsisten kepada masyarakat yang tertinggal, sehingga mereka tinggal menuju ke tempat-tempat ini untuk mendapatkan pelayanan. Enam hub yang disediakan Centerlink berlokasi di Northern Territory. Income management diberikan secara relevan untuk setiap pengunjung di Northern Territory. Meski pelayanan utama ditujukan kepada suku indigenous, namun pelayanan juga diberikan kepada masyarakat non-indigenous yang membutuhkan. Tantangan yang dihadapi oleh Centerlink di antaranya: demografi di mana sedikitnya penduduk usia produktif kerja, dan lebih banyak orang tua, pelayanan online dan tatap muka menjadi satu tantangan, perubahan teknologi, perekrutan para staff, memberikan kesempatan alternative dalam hal infrastruktur, reformasi pelayanan, dan pembentukan lokasi centrelink dan medicare yang dapat terintegrasi di satu lokasi.

Pembayaran jaminan social Centerlink paling banyak diberikan kepada pensiunan, 65 (M) dan 64.5 (F). Hal ini dimulai sejak usia 60 dan dilanjutkan sampai usia 65, dan diberikan kepada mereka yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan pendapatan mereka. Government pension, superannuation dari perusahaan, individual investment dalam bentuk saham, dsb. Tingkat pendapatan adalah bagian yang menentukan berapa pensiun yang diterima dari pemerintah. Disability support pension diberikan kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, dan psikologis, secara permanen. Ada 2.1 juta pensiun, dan 800 ribu orang cacat yang menerima bantuan



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

	<p>semacam ini. Pembayaran diberikan dengan membagi rata kepada mereka yang membutuhkan perawat, antara penerima pensiun dan sang perawat. SK menyebutkan ada informasi dalam booklet yang dapat dibaca oleh anggota DPR. Jaminan perawat diberikan untuk mereka yang mengalami keterbatasan mental dan membutuhkan bantuan kesehatan dan berlokasi di rumah. Pembayaran juga diberikan kepada mereka yang tidak mendapat kerja, namun sedang mencari kerja, dan ada juga youth allowance, yaitu bantuan yang diberikan kepada pelajar di usia 16-24 tahun, dan mereka yang tidak bekerja. Untuk memberikan berapa yang diterima, faktor yang diperhatikan adalah berapa penghasilan orang tuanya, dan pengaturan hidupnya. Mereka yang tinggal secara terpisah dari orang tuanya memperoleh lebih dibandingkan mereka yang tinggal bersama orang tuanya. Ada pun pembayaran yang diberikan kepada keluarga, termasuk imunisasi, child care, family tax benefits, dan kepada mereka yang baru saja melahirkan. Pelayanan yang diberikan oleh Centerlink meliputi multilingual services, indigenous, call center, emergency, social worker, financial information services, job capacity assessment, health professional advisory. Kartu konsesi diberikan untuk meliputi pensiunan, health care, dan commonwealth senior dan juga single parent, kartu buat student, mereka yang berpendapatan rendah, kartu kesehatan buat mereka yang sudah pensiun secara pribadi. Semuanya diharapkan bermanfaat dalam mendapat kemudahan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transport. Konsesi ini tidak memberikan pelayanan yang sama dan ditawarkan secara berbeda oleh masing-masing state.</p> <p>Medicare benefit diberikan oleh medicare, meliputi pelayanan kesehatan yang murah, memberikan appointment dokter, pemotongan biaya perawatan di rumah sakit.</p>	
5	<p><u>PERTANYAAN 1</u> <i>Diajukan oleh Drs. H Zulkarnaen Djabbar</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Bagaimana cara memperoleh data valid angka kemiskinan? Apakah dilakukan melalui pendapatan minimum, seperti UMR? Sebab jika melalui UMR, 27 % penduduk Indonesia termasuk miskin, jadi kriteria miskin seperti apa yang dibuat oleh pemerintah Australia?- Apakah mereka para pensiunan dan yang masuk kategori miskin bisa disatuatapkan?- Bagaimana menangani suku Aborigines, yang di Indonesia	<p>Proses komunikasi dua arah yang berlangsung sangat tidak efektif, karena pertanyaan harus</p>



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

	<p>diserupakan sebagai KAT (Komunitas Adat Terpencil)?</p> <p>JAWABAN: SK: Di Australia, setiap orang memiliki TFN. TFN ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja di mana, dan sebagainya. Dari data itulah didapatkan data kemiskinan dimaksud. Data diperoleh secara kumulatif dari berbagai department. Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh.</p> <p>JAWABAN: SK: Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka. Untuk suku Aborigines, tidak ada pensiunan secara khusus hanya untuk Aborigines. Pensiunan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Berhubung banyak suku Aborigines yang tidak berbahasa Inggris, penanganannya diberikan dalam form sederhana, atau diberikan secara verbal.</p>	<p>berlangsung bolak-balik dari penanya, ke penerjemah, ke penjawab, ke penerjemah lagi, dan kembali ke penanya.</p>
6	<p>PERTANYAAN 2: <i>Diajukan oleh H.JAZULI JUWAINI</i> Apakah anggaran Centerlink diterima dari pemerintah sepenuhnya atau ada donasi swasta? Berapa persen anggaran pemerintah yang diberikan untuk orang miskin? Enam lembaga itu berada di bawah DHS secara terintegrasi atau bagaimana? Apakah mereka yang tidak bekerja dan mendapat santunan Centerlink sebelum bekerja disantuni atau juga diberikan akses untuk mendapat pekerjaan?</p> <p>JAWABAN SK: Semua dana centerlink diterima dari dana pemerintah. Dimana APBN Australia sebanyak 30% memang ditujukan untuk jaminan social. Biaya pensiun yang dikeluarkan tahun 2010 lalu adalah sebesar 32 milyar dollar. Informasi di masing-masing bagian DHS diberikan secara terintegrasi. Meski kadang ada permasalahan antara departemen muncul, namun semuanya bermitra dalam membahas sebuah kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk yang mendapat santunan karena tidak bekerja, Centerlink mengadakan Jobs Services Australia, yang dieksekusi oleh lembaga swasta bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Centerlink, dan mereka</p>	<p>AKK tidak ada di ruangan sejak jam 10.20-10.35. Sementara sebagian lain anggota Komisi VIII DPR meninggalkan ruangan untuk ke toilet, dan kembali beberapa menit kemudian.</p>



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

		memberikan masukan penuh kepada pelanggan dalam mencari kerja	
7		<p><u>PERTANYAAN 3:</u> Diajukan oleh Dra. Hj. Soemintarsih Muntoro: - Apakah Centerlink lembaga swasta atau pemerintah? - Dan apakah ada social service kepada mereka yang mengalami bencana?</p> <p>JAWABAN: SK: Centerlink adalah bagian pemerintah, para petugasnya adalah pegawai negeri pemerintah Australia. Layanan yang diberikan oleh Centerlink sifatnya berdasarkan kebutuhan. Peran penting Centerlink terlihat pada saat memberikan input kepada departemen pemerintah yang mengeksekusi kebijakan, mengingat masing-masing departemen pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda. Untuk emergency response, respon yang diberikan oleh pemerintah dilakukan secara terkoordinasi, dengan memberikan kewenangan kepada satu departemen untuk memimpin, contohnya DFAT dalam kasus Bom Bali, karena itu merupakan isu luar negeri. Sementara itu bencana dalam negeri ditangani secara langsung oleh state government. Dalam eksekusi pelayanan, tidak ada pelayanan yang berbeda antara laki-laki dan wanita, namun yang dibedakan adalah PR dan non PR. Mayoritas pembayaran diberikan kepada PR dan Australian citizen. Kerjasama G2G juga memungkinkan, seperti dalam kasus penduduk Australia dan New Zealand yang dapat mengunjungi satu sama lain tanpa paspor dan warga negara New Zealand yang tinggal di Australia juga mendapat bantuan Centerlink, sekiranya membutuhkan. Dalam kaitannya dengan bencana banjir di QLD beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan pembayaran kepada mereka yang mengalami penderitaan, tapi bantuan ini hanya diberikan WNA dan PR.</p>	
8		<p><u>PERTANYAAN4:</u> <i>diajukan oleh Abdul Rozaq Rais</i> Bagaimana peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan?</p> <p>JAWABAN SK: Pemerintah memberikan prosentase yang berbeda dan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan orang cacat, selain ada kewajiban-kewajiban tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai</p>	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

		bentuk kepedulian perusahaan terhadap mereka yang yang bekerja	
9		<p><u>PERTANYAAN 5:</u> <i>diajukan oleh Dra. Hj. Choirunnisa</i></p> <p>Bagaimana mekanisme pembayaran dalam bencana alam, apakah hanya diberikan kepada para korban, atau juga untuk mengganti infrastruktur? Di Indonesia ada bencana terjadi, tapi bantuan tidak bisa langsung diberikan. Bagaimana dengan di Australia? Apa bisa langsung? Bagaimana pengawasan terhadap bantuan social ini?</p> <p><u>JAWABAN SK:</u> Pemerintah pusat memberikan pembayaran kepada mereka yang membutuhkan, berupa uang tunai, mereka hanya perlu memberikan bukti bahwa mereka memang terkena bencana, berapa banyak kerugian yang diterima, dan uang dapat diberikan secara langsung. Bentuk pendataan dilakukan secara elektronik. Sementara bagi mereka yang bukan pelanggan Centerlink, rekaman dapat dilakukan secara maksimal. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya uang, tapi juga berupa makanan, paket, dan menggunakan IT untuk mendapat informasi dari pelanggan.</p> <p>Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin kecil jaminan social yang diberikan pemerintah lewat Centerlink.</p>	
10	10:58	Pertemuan diakhiri dan ditutup oleh Pak Duta Besar. Acara selanjutnya adalah foto bersama antara Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Mr Stephen Kelly, dan dilanjutkan dengan coffee break.	



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students
Association of Australia

Catatan Kaki: Tentang PPI Australia

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPI Australia) adalah organisasi yang lahir pada tahun 1981 di Canberra untuk memfasilitasi interaksi dan mendukung kegiatan pelajar Indonesia yang sedang belajar, atau akan belajar, di Australia.

Mewakili lebih dari 18,000 pelajar Indonesia di Australia, jaringan organisasi PPI Australia terdiri dari 27 PPIA Ranting dengan lingkup universitas, 7 PPIA Cabang dengan lingkup negara bagian, dan organisasi induk (PPIA Pusat) dengan lingkup nasional.

Program video dokumenter YouTube **Lingkar Ide PPIA**, publikasi buku akademis **Contribution Matters**, program sosial **Buku Untuk Anak Bangsa**, **Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI)**, serta pengumpulan informasi **Beasiswa Australia** terlengkap adalah sebagian dari berbagai program inovatif yang diselenggarakan oleh PPI Australia.

Saat ini PPI Australia adalah koordinator Aliansi Perhimpunan Pelajar Indonesia Internasional atau OISAA (*Overseas International Student Association Alliance*). Informasi ke-45 PPI yang tergabung dalam OISAA dapat dilihat di www.oisaa.org.

Informasi selengkapnya seputar PPI Australia dapat dilihat di website www.ppi-australia.org